

LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah : **“The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia”**

Jumlah Penulis : **2 orang**

Status Pengusul : **Penulis ke- 2**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : **Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran Terakreditasi SINTA 3**

b. Nomor ISSN : **No. E-ISSN: 2549-001X, No. P-ISSN: 1412-6303**

c. Volume, no,bl, th : **Vol 20 No. 2, 2020**

d. Penerbit : **UIN Antasari Banjarmasin**

e. DOI artiket (jika ada) :

f. Alamat web Jurnal : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/4060>

Alamat Artikel : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/4060/2278>

g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

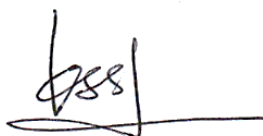
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional /Internasional bereputasi \*\*  
(beri ✓ pada kategori yang tepat)  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS\*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Yang Diperoleh .....
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)	1,5	1,5	1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	5,5	5,5	5,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	5,5	5,5	5,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	5,5	5,5	5,5
<b>Total = (100%)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Nilai Pengusul = 40% x 18 = 7,2</b>			

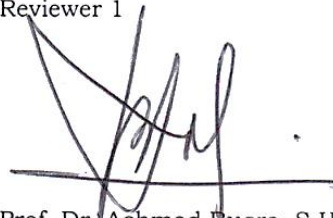
Semarang, 14 April 2021

Reviewer 2



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S.  
NIP 196110051986031002  
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Reviewer 1



Prof. Dr. Achmad Busro, S.H.,M.Hum  
NIP 195109151977031001  
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah : **“The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia”**

Jumlah Penulis : **2 orang**

Status Pengusul : **Penulis ke- 2**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : **Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran Terakreditasi SINTA 3**

b. Nomor ISSN : **No. E-ISSN: 2549-001X, No. P-ISSN: 1412-6303**

c. Volume, no,bl, th : **Vol 20 No. 2, 2020**

d. Penerbit : **UIN Antasari Banjarmasin**

e. DOI artiket (jika ada) :

f. Alamat web Jurnal : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/4060>

Alamat Artikel : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/4060/2278>

g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional /Internasional bereputasi \*\*  
(beri ✓ pada kategori yang tepat)  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS\*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Yang Diperoleh .....
	Internasional/ Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional 1 <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6		5,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6		5,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		6		5,5
<b>Total = (100%)</b>		<b>20</b>		<b>18</b>
<b>Nilai Pengusul = 40% x 18 = 7,2</b>				

Catatan Penilaian Jurnal Oleh Reviewer :

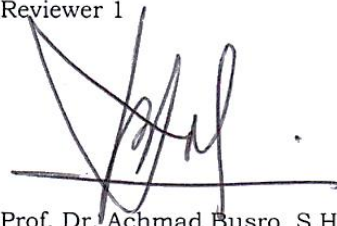
- a. Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur isi jurnal cukup lengkap.
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Ruang lingkup keilmuan artikel yang ditulis adalah tentang hukum ekonomi Islam, yang merupakan bagian khusus dari hukum Islam. Pembahasan di awal memberikan pemahaman tentang *legal issue* berupa kekosongan hukum atas operasional fintech syariah. Kemudian dijelaskan dengan cukup mendalam oleh penulis tentang eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas aspek syariah, adalah penting bagi fintech syariah di Indonesia. Karena belum ada dasar hukum khusus bagi operasional fintech syariah, maka pemikiran tersebut memanfaatkan dasar hukum umum yang digunakan bagi sebuah Perseroan terbatas (PT), dimana undang-undang PT bahkan telah memiliki klausula khusus tentang kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah. Selain itu juga memanfaatkan Undang-undang OJK, khususnya tentang tata kelola yang baik. Simpulan dari pembahasan sudah cukup baik, bahwa operasional pada fintech syariah memerlukan pengawasan aspek syariah. Hal tersebut untuk menjamin diterapkannya prinsip-prinsip syariah. Untuk keperluan tersebut, perlu dibuat regulasi khusus, guna mengatasi kekosongan hukum. Adapun rekomendasi terkait hasil kajian juga realistis dan penting, ditujukan bagi Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan institusi dengan kewenangan penuh untuk membuat regulasi sebagaimana dimaksud, sebelum adanya peraturan perundangan lain yang secara khusus mengatur fintech syariah.
- c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Data dan informasi yang disajikan telah cukup memadai dan cukup mutakhir pada saat artikel terbit. Kemudian hal ini dibuktikan dengan analisa peraturan perundang-undang terkait yang masih berlaku. Pencantuman referensi juga secara cukup dituangkan dalam artikel dengan disertai berbagai teori yang relevan guna mendukung analisis penulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hal ini sesuai dengan fokus kajian yang menyoroti masalah dasar hukum dan

problematikanya. Artinya kajian ini, dilakukan dengan mengkritisi perundang-undangan yang terkait. Metodologi telah digunakan secara baik dan konsisten dalam artikel tersebut.

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : Kualitas penerbit jurnal terakreditasi sinta 3.

Semarang, 16 Maret 2021

Reviewer 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Busro', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Achmad Busro, S.H.,M.Hum

NIP 195109151977031001

Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah : **“The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia”**

Jumlah Penulis : **2 orang**

Status Pengusul : **Penulis ke- 2**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : **Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran Terakreditasi SINTA 3**

b. Nomor ISSN : **No. E-ISSN: 2549-001X, No. P-ISSN: 1412-6303**

c. Volume, no,bl, th : **Vol 20 No. 2, 2020**

d. Penerbit : **UIN Antasari Banjarmasin**

e. DOI artiket (jika ada) :

f. Alamat web Jurnal : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/4060>

Alamat Artikel : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/4060/2278>

g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional /Internasional bereputasi \*\*  
(beri ✓ pada kategori yang tepat)  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS\*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Yang Diperoleh .....
	Internasional/ Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional 1 <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6		5,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6		5,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		6		5,5
<b>Total = (100%)</b>		<b>20</b>		<b>18</b>
<b>Nilai Pengusul = 40%x 18 = 7,2</b>				

Catatan Penilaian Jurnal Oleh Reviewer :

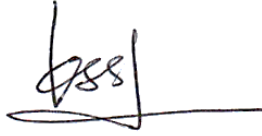
- Kelengkapan unsur isi jurnal : Jurnal telah lengkap memuat unsur yang harus ada dalam sebuah jurnal ilmiah. Jurnal dilengkapi DOI dan tanggal pemrosesan. Adanya saran setelah kesimpulan menjadikan jurnal lebih baik dari hanya sekedar kesimpulan.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Ruang lingkup dari artikel ini merupakan bagian dari hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus. Pembahasan telah cukup mendalam dimulai dari pembukaan yang membahas tentang perlunya lembaga pengawas syariah dalam bidang Fintech. Hal ini penting, karena potensi pengembangan fintech syariah besar, serta sangat relevan dengan kebutuhan perlindungan aspek syariah. Dalamnya pembahasan juga nampak dari analisis beberapa peraturan perundangan yang berpotensi menimbulkan problem pada fintech syariah, khususnya peran Dewan Pengawas Syariah. Kritik terhadap kekosongan pengaturan khusus terkait fintech syariah juga didukung dengan argumen yang baik, dan logis. Dari hasil pembahasan tersebut, penulis menawarkan solusi sementara, guna menjaga eksistensi pengawasan aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang telah menyatakan sebagai lembaga berbasis syariah.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Data dan informasi telah cukup mutakhir disajikan sesuai dengan tahun terbitnya artikel. Analisa peraturan perundang-undangan terbaru disertai referensi dari penelitian terdahulu menjadi bukti dari mutakhirnya data. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini menganalisis beberapa peraturan perundangan yang relevan, khususnya undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun metodologinya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang telah dipraktekkan secara cukup konsisten dalam narasi artikel penelitian. Penyajian informasi terkait penelitian juga dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penggunaan bahasa

Inggris juga sudah cukup baik dan menunjukkan usaha lebih oleh penulis dalam menyampaikan gagasan.

- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : Penerbit merupakan perguruan tinggi Islam yang cukup terkenal di Kalimantan, Jurnal juga telah terakreditasi SINTA 3 Dikti.

Semarang, 8 April 2021

Reviewer 2



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S.

NIP 196110051986031002

Unit kerja : Fakultas Hukum Undip